

DAFTAR PUSTAKA

- AIPI. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Arkanudin Rizki Permono, Vincent Hadi Wiyono, L. H. (2020). Peran Penyuluh Pertanian Swadaya Dalam Mendukung Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Akibat Perkembangan Kawasan Solobaru Kabupaten Sukoharjo. 01(08), 69–75.
- Fatma Anisa, M F. A. (2021). Evaluasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Kecamatan Padang Sago , Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Padang Sago merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Padang. 5(4), 1137–1150.
- Grindle, M. S. (1980). *Police And Policy Implementation In The Third World*. Princeston University Press.
- Nela Inna Nurgulina. (2021). Pola komunikasi penyuluh pertanian dengan kelompok tani di kecamatan air kumbang kabupaten banyuasin provinsi sumatera selatan.
- Ni Putu Istri Padmaswari, Nyoman Sutjipta (2018). Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai Fasilitator Usahatani Petani di Subak Empas Buahhan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan. 7(2), 277–285.
- Rahayu, S. W. (2021). Pertanian, Pengaruh kompetensi penyuluh terhadap efektivitas pelaksanaan program kartu tani. 1(12), 1361–1369.
- Roni, Y., & Setyawan, D. (2020). Peran Dinas Koperasi dan Perdagangan Dalam Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi. 9(1), 73–80.
- Sianturi, N. L. M. (2019). Peran Penyuluh Dalam Pengembangan Kelompok tani Di Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Politeknik Pembangunan Medan, 75.
- Syarief Nurdin, Encep. 2019. *Teori-Teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: CV Maulana Media Grafika.
- Soerjono Soekanto, (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT RAJA GRAFINDO PERSADA.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*. ALFABETA.

Wardani, O. A. (2018). *Education Role Of Strengthening Of Land Groups And Farmers Regeneration In Bogor Regency*. 2(1), 191–200.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tahun 2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 04/kpts/RC.210/B/01/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022

<https://pertanian.lumajangkab.go.id/halaman/sigarpunbulat>

<https://pertanian.lumajangkab.go.id/dapoktan>

<https://ppid.semarangkota.go.id/cara-membuat-kartu-tani/>

<http://biroinfrasda.jatengprov.go.id/programkegiatan/kartu-tani/>